

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah agenda penting negara yang merupakan kunci suksesnya pembangunan negara tercinta ini. Dengan proses pendidikan dari zaman ke zaman telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia sehingga terciptalah kehidupan manusia yang beradab, ditata dengan sistem yang teratur dan ditopang oleh teknologi yang semakin canggih. Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan.

Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, propinsi maupun daerah. Hal ini diwujudkan dengan penganggaran semaksimal mungkin bagi kelangsungan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan, kecakapan keterampilan, dan sikap-sikap dasar yang diperlukan untuk pembentukan dan pengembangan pribadi yang utuh. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi manusia yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan local, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, seluruh komponen pendidikan di

sekolah harus berusaha meningkatkan diri guna mendukung kemajuan pendidikan itu sendiri.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu wacana penting dalam penyelenggaraan system pendidikan nasional, masih perlu banyaknya usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Usaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan diawali dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran yang ada pada semua jenjang pendidikan, karena proses pembelajaran ini merupakan kegiatan utama disuatu sekolah.

Empat faktor penting yang harus ada dalam proses ini yaitu guru, murid, kurikulum, dan bahan pelajaran. Keempat factor tersebut dapat membuat proses pembelajaran dapat terlaksana dengan nyaman, kondusif, dan proses pembelajaran berkualitas apabila terdapat penunjang yang lebih baik, yaitu mengenai factor sarana dan prasarana. Pembelajaran di sekolah akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan jika keempat factor yang disebutkan di atas saling menyesuaikan dan dimaksimalkan dengan adanya sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal.

Menurut Mulyasa (2003), menyatakan bahwa sarana dan prasarana sebagai salah satu komponen penunjang proses pembelajaran merupakan alat yang sering digunakan guru untuk merealisasikan tujuan pembelajaran tersebut, hal ini juga bukan hanya memberi pengalaman konkret tetapi juga membantu siswa dalam mengintegrasikan pengalaman yang terdahulu. Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses

belajar mengajar di sekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan secara optimal.

Seiring dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau yang lebih dikenal dengan istilah KTSP dimana penerapan desentralisasi pengambilan keputusan, memberikan hak otonomi penuh terhadap setiap tingkat satuan pendidikan, untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut pemerintah melalui PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut di tekankan kembali pada Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 pada bab VII pasal 42 ayat 2 mencantumkan bahwa, setiap satuan pendidikan harus memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain dan tempat berkreasi yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sebuah lembaga pendidikan harus menyadari bahwa keberhasilan proses pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi tersedia tidaknya kelengkapan sarana pendidikan. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan disekolah menengah pertama sekecamatan Popayato telah tersedia berbagai pelayananya namun untuk mengetahui tingkat capaian standar pelayanan minimal prasarana dan sarana tersebut dapat dibuktikan dengan dilakukannya penelitian secara mendalam untuk mengetahui apakah telah terlaksana sepenuhnya. Salah satu sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan Popayato adalah SMPN 1 Popayato Barat, berdasarkan hasil observasi awal bahwa pelayanan prasarana ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru dan tempat bermain sudah dapat disediakan namun belum terpenuhi standar layanan fasilitas penunjang langsung kegiatan belajar mengajarnya (sarana) yang memadai.

Peningkatan pendidikan akan sulit dilaksanakan jika sarana yang ada kurang lengkap. Seorang pendidikpun kadang kurang mengoptimalkan sarana yang ada dalam proses pembelajaran karena faktor pemborosan waktu, tenaga, bahkan tidak sedikit juga kurang paham cara penggunaan sarana yang ada. Akhir-akhir ini masih sering ditemukan banyak sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak lagi digunakan sesuai

dengan fungsinya. Keadaan seperti ini disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan dan evaluasi yang memadai. Hasil studi Malik dalam Susan (2013:3), menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara beberapa ukuran kepuasan peserta didik dengan lingkungan pendidikan yang mendukung.

Menurut Susan dalam skripsi penelitiannya (2013:3), 75% kepala sekolah menunjukkan bahwa fasilitas sekolah yang baik berdampak positif terhadap sikap guru, perekrutan guru, perilaku siswa, sikap orang tua dan masyarakat sehingga lebih mendukung program sekolah. Menurut data Balitbang Depdiknas dalam Susan (2013:4), menyebutkan pada jenjang SMP 28,41% dari 34.185 berstandar minimal dan 26% tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak terpenuhi sarana dan prasarananya.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, pencapaian standar minimal sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi, baik pada sekolah dasar maupun sekolah menengah. Dengan melihat faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang telah disebutkan di atas, maka sekolah dituntut untuk dapat menyediakan sarana prasarana tersebut yang bermutu dan mengoptimalkan penggunaannya dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang memuaskan kepada siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program standar pelayanan minimal sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Ketertarikan penulis untuk meneliti Standar

Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana di SMP Se-kecamatan Popayato Barat karena banyaknya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah agar masyarakat mendapatkan pendidikan layak dengan sarana dan prasarana memadai dengan tujuan terlaksananya Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang standar layanan minimal prasarana dan sarana yang harus disediakan pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan mengatur anggaran pendidikan baik di pusat, propinsi maupun daerah haruslah minimal 20% dari anggaran keseluruhan APBN. Ini tentu saja secara kuantitatif merupakan angin surga bagi penyelenggara pendidikan karena sudah terbayang peningkatan kesejahteraan dari anggaran ini. Namun pada kenyataannya upaya-upaya tersebut masih saja kurang atau belum mampu memberikan kemudahan untuk setiap lembaga sekolah dalam menyediakan fasilitas prasarana dan sarannya.

Setinggi apapun biaya yang dianggarkan untuk pendidikan, tetap saja ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor yang sangat vital bagi peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan. Semakin lengkap sarana dan prasarana, akan semakin efektif proses belajar dan mengajar dilaksanakan dan siswa akan semakin mudah menyerap setiap materi yang diajarkan. Untuk menanggapi masalah tersebut penulis sangat tertarik melakukan penelitian langsung, dengan melakukan evaluasi program standar layanan minimal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan kriteria standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Pertama. Informasi tercapai atau tidaknya suatu program pendidikan bisa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Satu pengertian pokok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya standar, tolok ukur, atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upaya untuk mengumpulkan data mengenai kondisi nyata sesuatu hal, kemudian dibandingkan dengan kriteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau seberapa tinggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai kondisi yang diharapkan.

Upaya pengadaan sarana prasaran, diperlukan adanya standar pelayanan yang dapat dijadikan sebagai acuan. standar yang dimaksud adalah standar pelayanan minimal pendidikan (SPM). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana yang seharusnya diadakan pada setiap lembaga pendidikan khususnya di SMPN Se-kecamatan Popayato Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana standar prasarana pendidikan di SMPN se-Kecamatan Popayato Barat?
2. Bagaimana standar sarana pendidikan di SMPN se-Kecamatan Popayato Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilaksanakan di kecamatan Popayato mengacu pada rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui standar pelayanan minimal prasarana di SMPN se-Kecamatan Popayato Barat.
2. Untuk mengetahui standar pelayanan minimal sarana di SMPN se-Kecamatan Popayato Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran atau menambah informasi bagi perkembangan ilmu manajemen pendidikan tentang penerapan program standar layanan minimal sarana dan prasarana.
2. Untuk bahan rekomendasi bagi pelaksana program standar layanan pendidikan di sekolah dan sebagai perbaikan pelaksanaan SPM yang selanjutnya.